



Tinjauan Keuangan Dalam Perspektif Agama Kristen Di Gereja Batak Karo Protestan Rungguh Tongkoh Kabupaten Karo

Financial Review from a Christian Perspective at the Rungguh Tongkoh Protestant Karo Batak Church, Karo Regency

Adhel Naibaho¹, Deni Theresya Sitohang², Eka Sinaga³, Shinta Manurung⁴, Yosi Sianturi⁵

Universitas Negeri Medan

Email: adhel.7243342003@mhs.unimed.ac.id¹, deni.7243142036@mhs.ac.id²,
eka.7243142005@mhs.unimed.ac.id³, shintamanru.7243142018@mhs.unimed.ac.id⁴,
yosianjelina.7243142031@mhs.unimed.ac.id⁵

Article Info

Article history:

Received : 31-03-2026

Revised : 02-04-2026

Accepted : 04-04-2026

Published : 06-04-2026

Abstract

This study aims to analyze the financial management system at GBKP Rungguh Tongkoh through the perspective of nonprofit accounting and stewardship values. Using a qualitative case study method, data was collected through interviews, observations, and analysis of financial report documents. The results indicate that GBKP Rungguh Tongkoh implements collective-collegial management, where funds are managed by the Rungguh Assembly Working Body (BPMR), which is democratically elected every five years. Transparency is demonstrated through "Momo" (Congregation News), which records every transaction detail openly to the congregation. Furthermore, a cross-subsidy system exists through the distribution of collection deposits (storting), with 60% going to the local treasury and 40% to the classis (classis) to ensure equitable distribution of pastors' salaries, structured similarly to a civil servant system. Accountability in this church is not merely administrative compliance but also a form of accountability for faith through a rigorous annual verification process. For future efficiency, this study recommends digitizing financial reports and standardizing the verification pocketbook.

Keywords: Accountability, GBKP Rungguh Tongkoh, Stewardship

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis sistem pengelolaan keuangan di GBKP Rungguh Tongkoh melalui perspektif akuntansi nirlaba dan nilai penatalayanan (stewardship). Menggunakan metode kualitatif studi kasus, data dihimpun melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GBKP Rungguh Tongkoh menerapkan manajemen kolektif-kolegial di mana pengelolaan dana dilakukan oleh Badan Pekerja Majelis Rungguh (BPMR) yang dipilih secara demokratis setiap lima tahun. Transparansi diwujudkan melalui "Momo" (Warta Jemaat) yang mencatat setiap detail transaksi secara terbuka kepada jemaat. Selain itu, terdapat sistem subsidi silang melalui pembagian setoran (storting) kolekte sebesar 60% untuk kas lokal dan 40% ke klasis guna menjamin pemerataan gaji pendeta yang terstruktur layaknya sistem PNS. Akuntabilitas di gereja ini bukan sekadar kepatuhan administrasi, melainkan bentuk pertanggungjawaban iman melalui proses verifikasi tahunan yang ketat. Untuk efisiensi di masa depan, penelitian ini merekomendasikan digitalisasi laporan keuangan dan standarisasi buku saku verifikasi.

Kata Kunci: Akuntabilitas, GBKP Rungguh Tongkoh, Penatalayanan



PENDAHULUAN

Organisasi keagamaan memiliki peran yang tidak hanya terbatas pada aspek spiritual, tetapi juga mencakup dimensi sosial, moral, dan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Gereja sebagai organisasi nirlaba dituntut untuk mengelola keuangan secara akuntabel dan transparan karena sumber dananya berasal dari persembahan jemaat yang memiliki nilai spiritual. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan gereja tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan iman kepada Tuhan serta jemaat.

Dalam perspektif akuntansi nirlaba, gereja memiliki karakteristik khusus karena tidak berorientasi pada laba, melainkan pada pelayanan. Penerapan standar akuntansi seperti ISAK 35 menjadi penting dalam penyusunan laporan keuangan organisasi nonlaba agar informasi yang disajikan relevan, andal, dan dapat dipahami oleh para pemangku kepentingan. Namun demikian, penelitian menunjukkan bahwa implementasi standar tersebut di lingkungan gereja masih belum optimal dan cenderung menggunakan sistem pencatatan sederhana berbasis kas (Apriliana et al., 2023).

Selain itu, akuntabilitas dalam organisasi gereja tidak hanya dilihat dari kepatuhan terhadap standar akuntansi, tetapi juga dari penerapan nilai-nilai spiritual seperti stewardship (penatalayanan). Kedoh dan Sulindawati (2022) menegaskan bahwa pengelolaan keuangan gereja merupakan bentuk tanggung jawab iman yang harus diwujudkan melalui kejujuran, transparansi, dan pelayanan kepada jemaat. Dengan demikian, praktik akuntansi dalam gereja memiliki dimensi teologis yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari aspek teknisnya. Lebih lanjut, transparansi laporan keuangan dan sistem pengendalian internal menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan gereja. Penelitian oleh Munthe dan Sari (2021) menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal yang baik dapat meminimalkan risiko penyimpangan dalam organisasi keagamaan. Sementara itu, Aulia (2025) menemukan bahwa transparansi laporan keuangan berkontribusi terhadap peningkatan kinerja pelayanan gereja.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji akuntabilitas dan transparansi keuangan gereja, sebagian besar masih berfokus pada aspek teknis penerapan standar akuntansi, seperti ISAK 35 dan pengendalian internal. Penelitian-penelitian tersebut cenderung belum banyak mengeksplorasi bagaimana praktik pengelolaan keuangan gereja diintegrasikan dengan nilai-nilai teologis dan budaya organisasi gereja secara konkret di tingkat lokal. Selain itu, kajian mengenai mekanisme kolektif-kolegial, transparansi berbasis komunitas, serta sistem subsidi silang dalam konteks gereja tertentu masih relatif terbatas, khususnya pada lingkungan Gereja Batak Karo Protestan (GBKP).

Berdasarkan hasil wawancara lapangan di GBKP Runggun Tongkoh, ditemukan bahwa sistem pengelolaan keuangan gereja telah dilakukan secara terstruktur melalui mekanisme kolektif-kolegial. Pengelolaan keuangan tidak terpusat pada individu tertentu, melainkan dikelola oleh badan pekerja majelis runggun, sehingga mencerminkan prinsip akuntabilitas bersama. Selain itu, seluruh transaksi keuangan dicatat secara rinci dan dipublikasikan melalui warta jemaat, sehingga jemaat dapat mengakses informasi keuangan secara terbuka. Transparansi ini diperkuat dengan adanya proses verifikasi tahunan yang melibatkan pemeriksaan dokumen seperti kuitansi, buku kas, dan laporan setoran. Mekanisme ini menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak hanya dilakukan secara formal, tetapi juga melalui partisipasi jemaat



sebagai bentuk kontrol sosial. Selain itu, terdapat sistem pembagian keuangan (storting) antara runggun dan klasis yang mencerminkan prinsip subsidi silang. Sistem ini memungkinkan pemerataan kesejahteraan pelayan gereja, termasuk pendeta di jemaat kecil, sehingga mencerminkan nilai keadilan dan solidaritas dalam komunitas iman. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji secara mendalam bagaimana praktik pengelolaan keuangan di GBKP Runggun Tongkoh tidak hanya memenuhi prinsip akuntansi nirlaba, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai Kristiani dalam bentuk transparansi, akuntabilitas, dan penatalayanan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan sistem akuntabilitas keuangan pada organisasi keagamaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik akuntabilitas keuangan di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Runggun Tongkoh sebagai organisasi nirlaba yang memiliki dimensi administratif dan spiritual. Metode penelitian disusun untuk menangkap realitas objektif berupa data keuangan serta realitas subjektif berupa nilai kepercayaan dan tanggung jawab moral pengelola keuangan gereja.

Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, Pendekatan ini dipilih karena akuntabilitas di lembaga keagamaan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan nilai iman dan budaya organisasi, Studi kasus memungkinkan peneliti melakukan pengamatan secara mendalam dan kontekstual terhadap satu objek penelitian, GBKP Runggun Tongkoh dipilih karena memiliki praktik transparansi yang khas, seperti penggunaan warta jemaat Momo dan sistem storting antarjemaat.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi metode untuk meningkatkan validitas temuan, yaitu, Wawancara mendalam, dilakukan kepada informan yang dipilih secara purposive: Bendahara Runggun, ketua Majelis, tim Verifikasi, beberapa anggota jemaat. Wawancara bertujuan menggali proses pengelolaan keuangan, mekanisme pengawasan, tanggung jawab moral dan spiritual dalam pengelolaan dana gereja, Observasi partisipatif peneliti hadir langsung dalam kegiatan gereja seperti, penghitungan persembahan, rapat majelis, pembagian warta jemaat, Observasi digunakan untuk melihat kesesuaian antara informasi wawancara dengan praktik nyata di lapangan. Analisis dokumentasi dokumen yang dianalisis meliputi, buku kas harian, kuitansi pengeluaran, laporan setoran ke klasis, arsip warta jemaat Momo, Analisis dilakukan untuk menilai konsistensi pencatatan dan sistem pengendalian internal.

Teknik analisis data

Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, Penyajian data dilakukan secara naratif deskriptif agar alur pengelolaan keuangan dapat dipahami secara sistematis.



Uji Keabsahan Data

Untuk menjamin kredibilitas penelitian, dilakukan member check, yaitu meminta konfirmasi kepada informan terhadap hasil interpretasi peneliti. Pengamatan berkelanjutan di lokasi penelitian untuk memahami dinamika organisasi secara lebih mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gereja GBKP memiliki sejarah yang berawal dari Pos Pelayanan Ibadah (Pos PI) dan pada masa awalnya masih bergabung sebagai satu runggun dengan Tanjung Barus. Seiring dengan perkembangan jumlah jemaat dan kebutuhan pelayanan yang semakin meningkat, gereja ini kemudian berkembang menjadi runggun yang mandiri. Mayoritas jemaatnya terdiri dari para pendatang yang datang dari berbagai daerah, sementara masyarakat asli di wilayah tersebut didominasi oleh Suku Karo yang sebagian besar beragama Islam. Kondisi ini menjadikan GBKP tidak hanya berperan sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai wadah pembinaan iman bagi jemaat yang hidup di tengah keberagaman sosial dan budaya. Meskipun tergolong sebagai gereja yang relatif baru dengan jumlah sekitar 70 kepala keluarga, GBKP telah menunjukkan kemampuan dalam membangun tata kelola organisasi yang mandiri, tertib, dan terstruktur dengan baik.

Secara organisasi, gereja ini berada di bawah Klasis Barus Sibaya yang menaungi sekitar 25 runggun, dan secara hierarkis berada di bawah Sinode GBKP yang berkedudukan di Kabanjahe. Struktur kepemimpinan di tingkat runggun dikelola oleh Majelis Runggun yang terdiri dari pendeta, penatua, diaken, serta anggota emeritus yang memiliki pengalaman pelayanan. Majelis ini bertanggung jawab dalam menentukan arah kebijakan gereja, baik dalam bidang pelayanan rohani maupun pengelolaan organisasi. Dalam pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari, tugas tersebut dilimpahkan kepada Badan Pekerja Majelis Runggun (BPMR) yang dipilih setiap lima tahun sekali melalui mekanisme yang demokratis. Menariknya, dalam struktur ini pendeta tidak secara otomatis menjabat sebagai ketua BPMR, melainkan tetap melalui proses pemilihan, sehingga mencerminkan prinsip kolegialitas dan kebersamaan dalam kepemimpinan gereja.

Pembinaan jemaat dilakukan secara sistematis melalui pembagian sektor dan kelompok kategorial yang disesuaikan dengan usia serta status sosial jemaat. Anak-anak dibina melalui KKR, pemuda melalui Permata, kaum bapak melalui Mamre, kaum ibu melalui Muria, serta lansia melalui kelompok Zaitun yang diperuntukkan bagi jemaat berusia di atas 60 tahun. Pembagian ini bertujuan untuk memastikan setiap kelompok mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan rohani dan sosial mereka. Selain ibadah Minggu sebagai kegiatan utama, gereja juga secara rutin melaksanakan Penelaahan Alkitab (PA) yang dilakukan baik di gedung gereja maupun di rumah-rumah jemaat secara bergiliran. Kegiatan ini tidak hanya memperdalam pemahaman iman, tetapi juga mempererat hubungan kekeluargaan antarjemaat. Dalam aspek keuangan, GBKP menerapkan sistem pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan disiplin. Setiap tahun disusun anggaran yang direncanakan secara matang dan diverifikasi secara ketat sebelum disahkan. Sumber dana gereja berasal dari kolekte, persepuluhan, serta ucapan syukur jemaat. Dana yang terkumpul kemudian dialokasikan dengan sistem pembagian 60% untuk kebutuhan runggun dan 40% disalurkan ke tingkat klasis atau sinode sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam mendukung pelayanan yang lebih luas. Sistem ini menunjukkan adanya semangat kebersamaan dan solidaritas antarjemaat dalam lingkup yang lebih besar.



Salah satu keunikan utama dalam tata kelola keuangan GBKP adalah diterapkannya sistem subsidi silang dalam penggajian pendeta. Dalam sistem ini, gaji pendeta tidak dibebankan langsung kepada rungun tempat ia melayani, melainkan dikelola oleh kantor klasis melalui dana gabungan dari seluruh jemaat. Dengan demikian, pendeta yang melayani di rungun kecil tetap mendapatkan penghasilan yang layak dan setara dengan pendeta di rungun besar. Sistem ini tidak hanya menciptakan keadilan, tetapi juga menjamin kesejahteraan pendeta secara berkelanjutan, bahkan hingga masa pensiun.

Pengelolaan keuangan gereja dilakukan dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Setiap program kerja dan anggaran untuk tahun berikutnya telah disusun sejak bulan Agustus, sehingga memberikan waktu yang cukup untuk perencanaan yang matang. Penggunaan dana di luar anggaran pada dasarnya tidak diperbolehkan, kecuali dalam kondisi darurat yang harus melalui persetujuan khusus dari pihak terkait. Setiap transaksi keuangan dicatat secara rinci oleh bendahara, kemudian disetorkan ke bank untuk menjaga keamanan dana. Selain itu, dilakukan verifikasi tahunan oleh tim independen yang memeriksa seluruh laporan keuangan, mulai dari buku kas per kategori hingga bukti transaksi kecil seperti kuitansi pembelian kebutuhan operasional. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak adanya penyimpangan serta menjaga kepercayaan jemaat terhadap pengelolaan dana gereja. Lebih lanjut, sistem subsidi silang yang diterapkan juga memberikan perlindungan jangka panjang bagi para pendeta. Selain menerima gaji yang disesuaikan dengan golongan dan masa kerja, pendeta juga mendapatkan berbagai fasilitas kesejahteraan, seperti bantuan perumahan saat memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP) pada usia 60 tahun, gaji pensiun seumur hidup, serta tunjangan bagi janda pendeta hingga akhir hayat. Dengan adanya sistem ini, GBKP tidak hanya memperhatikan pelayanan rohani, tetapi juga aspek kesejahteraan para pelayan gereja secara menyeluruh.

Di samping itu, GBKP juga menunjukkan komitmen yang kuat dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia, baik bagi pelayan gereja maupun jemaat. Berbagai kegiatan pelatihan, pembinaan iman, serta penguatan kapasitas kepemimpinan secara berkala dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan. Pendeta, penatua, dan diaken tidak hanya berperan sebagai pemimpin rohani, tetapi juga sebagai pembimbing yang mampu menjawab tantangan zaman, termasuk dalam menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang semakin dinamis. Gereja juga mulai beradaptasi dengan memanfaatkan media digital sebagai sarana pelayanan, seperti penyebaran informasi kegiatan, renungan harian, hingga dokumentasi laporan keuangan secara lebih terbuka kepada jemaat.

Selain itu, peran sosial gereja juga semakin diperkuat melalui berbagai kegiatan diakonia, baik yang bersifat karitatif maupun pemberdayaan. Bantuan kepada jemaat yang membutuhkan, seperti dalam bentuk dana, sembako, maupun dukungan moral, menjadi bagian penting dari pelayanan gereja. Tidak hanya itu, gereja juga berupaya menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar lintas agama, sehingga tercipta suasana toleransi dan kerukunan yang baik. Dalam konteks ini, GBKP hadir sebagai agen perdamaian yang membawa nilai kasih, keadilan, dan kebersamaan di tengah masyarakat yang majemuk.

Dengan berbagai sistem dan praktik yang telah dijalankan, GBKP menunjukkan bahwa gereja bukan hanya sebagai institusi keagamaan, tetapi juga sebagai organisasi yang dikelola secara profesional dan berorientasi pada keberlanjutan. Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan,



kejelasan struktur organisasi, serta perhatian terhadap kesejahteraan pelayan dan jemaat menjadi faktor utama yang mendukung pertumbuhan gereja secara berkesinambungan. Hal ini sekaligus memperkuat kepercayaan jemaat terhadap gereja sebagai lembaga yang dapat diandalkan, baik dalam aspek spiritual maupun sosial.

Pada akhirnya, keberadaan GBKP sebagai runggun yang berkembang dari komunitas kecil menjadi organisasi yang mandiri menunjukkan adanya proses pembelajaran dan adaptasi yang berkelanjutan. Dengan tetap berpegang pada nilai-nilai iman Kristen serta prinsip tata kelola yang baik, GBKP diharapkan mampu terus bertumbuh dan memberikan kontribusi yang positif, tidak hanya bagi jemaatnya, tetapi juga bagi masyarakat luas. Ke depan, tantangan yang dihadapi tentu akan semakin kompleks, namun dengan fondasi yang kuat dalam iman, organisasi, dan manajemen, GBKP memiliki potensi besar untuk terus berkembang menjadi gereja yang relevan, inklusif, dan berdampak.

Gagasan / Solusi Permasalahan

Berangkat dari kondisi yang ada di lapangan, ditemukan bahwa pemahaman jemaat terhadap laporan keuangan gereja masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari ketidakmampuan sebagian jemaat dalam membaca, menafsirkan, serta memahami isi pembukuan yang disajikan setiap tahun. Tidak hanya jemaat, bahkan beberapa pengurus gereja juga kerap mengalami kesulitan dalam mengingat maupun menjelaskan kembali rincian laporan keuangan yang telah disusun. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara penyusunan laporan keuangan dengan tingkat literasi keuangan para pengguna laporan tersebut.

Solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini difokuskan pada penyusunan buku panduan laporan keuangan gereja yang sederhana, sistematis, dan mudah dipahami. Buku panduan ini dirancang sebagai pedoman praktis yang membantu pengurus dalam menyusun laporan keuangan sekaligus membantu jemaat dalam memahami isi laporan tersebut. Penyederhanaan format laporan dilakukan dengan menggunakan bahasa yang jelas, istilah yang mudah dimengerti, serta penyajian yang lebih ringkas dan terstruktur.

Buku panduan ini akan memuat beberapa komponen penting, seperti penjelasan dasar mengenai istilah-istilah keuangan gereja, contoh format laporan keuangan sederhana, langkah-langkah pencatatan yang runtut, serta panduan membaca dan menafsirkan laporan keuangan. Dengan adanya panduan ini, diharapkan proses penyusunan laporan menjadi lebih terarah dan seragam, sehingga memudahkan pengurus dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, keberadaan buku panduan ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman jemaat terhadap laporan keuangan yang disajikan. Jemaat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga mampu memahami isi laporan secara lebih baik. Hal ini akan mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan gereja.

Meskipun penyusunan buku panduan ini memerlukan waktu dan penyesuaian, terutama dalam menyederhanakan istilah dan format yang selama ini digunakan, langkah ini dinilai lebih efektif dan realistis untuk diterapkan dalam kondisi jemaat saat ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merancang buku panduan laporan keuangan gereja yang sederhana dan mudah digunakan, serta mengkaji sejauh mana panduan tersebut dapat meningkatkan pemahaman, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan gereja. Dengan demikian, diharapkan



hasil penelitian ini dapat menjadi solusi praktis dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan gereja.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan di GBKP Runggun Tongkoh telah memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam kerangka organisasi nirlaba serta nilai-nilai Kristiani. Sistem kolektif-kolegial melalui Badan Pekerja Majelis Runggun (BPMR) memastikan bahwa pengelolaan keuangan tidak terpusat pada individu, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan meminimalkan potensi penyimpangan. Transparansi diwujudkan melalui pencatatan yang rinci dan publikasi laporan keuangan dalam warta jemaat (Momo), yang memungkinkan partisipasi jemaat sebagai bentuk kontrol sosial. Selain itu, mekanisme verifikasi tahunan memperkuat akuntabilitas dengan memastikan kesesuaian antara pencatatan dan penggunaan dana.

Keunikan sistem keuangan GBKP terletak pada mekanisme subsidi silang melalui pembagian setoran (storting), yang memungkinkan pemerataan kesejahteraan pelayan gereja secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan tidak hanya berorientasi pada efisiensi administratif, tetapi juga pada nilai keadilan dan solidaritas dalam komunitas iman.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa akuntabilitas keuangan gereja tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga merupakan bentuk penatalayanan (stewardship) yang mencerminkan tanggung jawab iman. Sebagai implikasi praktis, diperlukan pengembangan sistem digitalisasi laporan keuangan dan standarisasi prosedur verifikasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pengelolaan keuangan di masa mendatang

DAFTAR PUSTAKA

- Andni, R., & Nurul Hidayah. (2023). Penerapan prinsip pengelolaan dana desa dalam mewujudkan good financial government of village. *Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas*, 2(2), 93-98.
- Apriliana, R. G., Ulupui, I. G. K. A., & Pahala, I. (2024). Analisis penerapan ISAK 35 tentang laporan keuangan organisasi nonlaba pada Gereja HKBP Kutabumi. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 5(2), 381-390.
- Aulia, R., Madaniah, N., & Putri, M. S. (2025). Pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan transparansi laporan keuangan terhadap kinerja pelayanan di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Nurdin. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 7(1), 68-76.
- Ginting, E. (2022). Memaknai semangat Calvin terhadap civil society: Dalam upaya GBKP memberdayakan manusia berbasis keberagaman. *Jurnal Teologi Cultivation*, 6(2), 1-17.
- Kedoh, A. R. D., & Sulindawati, N. L. G. E. (2022). Akuntabilitas Gereja dalam Pandangan Alkitabiah dan Stewardship Theory di GKP Kasih Karunia Sambangan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 12(2), 385-394.
- Munthe, M. L., & Sari, M. M. R. (2021). Application of non-profit accounting standard (PSAK 45) and internal control in religious organization. *SSRG International Journal of Economics and Management Studies*, 8(8), 29-32.
- Patty, M. (2026). Analisis pengendalian internal berbasis COSO pada pengelolaan keuangan Gereja Protestan Maluku. *Journal of Applied Accounting (JAA)*, 5(1), 1-9.



Sembiring, R. A. (2021). Sistem informasi keuangan pada Gereja Batak Karo Protestan (Skripsi, Universitas Islam Riau). Universitas Islam Riau.

Wattimury, W. A., Anthoni, J., & Suruan, Y. (2024). Manajemen keuangan gereja (Church financial management). *Eirene: Jurnal Ilmiah Teologi*, 9(1), 195– 216.